STRATEGI PERCEPATAN Geo KKP MELALUI KEGIATAN PENGADAAN JASA KONSULTAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RENDI OKTARESI
NIM. 13222736

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PENGESAHAN.....ii
LEMBAR KEASLIAN……...iii
HALAMAN MOTTO …….....iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..…….…… v
KATA PENGANTAR…… vi
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TABEL..... x
DAFTAR GAMBAR.....xi
DAFTAR LAMPIRAN…… xii
INTISARI……xiii
ABSTRACT……..…….....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Batasan Masalah..... 6
D. Tujuan Penelitian.....6
E. Manfaat Penelitian.....6
F. Kebaruan Penelitian.....7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....9
A. Kerangka Teoritis..... 9
1. Teori Sosial..... 9
2. Geo KKP.....10
3. Pengadaan Jasa Pemerintah.....20
4. Aktor.....28
5. Sumber Daya.....29
6. Strategi.....30
B. Kerangka Pemikiran..... 31

BAB III METODE PENELITIAN.....34
A. Jenis Penelitian..... 34
B. Lokasi Penelitian..... 35
C. Jenis Data.....35
D. Teknik Pengumpulan Data..... 36
E. Teknik Analisis Data..... 38

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN…… 39
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Semarang……39
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Semarang……40

Halaman

1. Pelayanan Pertanahan…… 40
2. Sumber Daya Manusia……...40
A. Gambaran Umum Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang…….. 41

BAB V PENGADAAN JASA KONSULTANSI GEO KKP KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG…….…... 44
A. Latar Belakang Perlunya Peningkatan Prosentase Geo KKP……. 44
1. Fakta Sejarah Pendaftaran Tanah……47
2. Kendala Sumber Daya Manusia……..52
3. Solusi……...54
B. Pengadaan Jasa Konsultan Geo KKP Kantor Pertanahan Kota Semarang…….55
1. Metode Pengadaan Jasa Konsultan…….……55
2. Sumber Pendanaan Pengadaan Jasa Konsultan…….. 56
3. Jadwal Pengadaan Jasa Konsultan……..57
4. Panitia Pengadaan Jasa Konsultan……..57
5. Persyaratan dan Kriteria Peserta……...…..58
6. Proses Pengadaan Jasa Konsultan……...59

BAB VI KUALITAS DATA Geo KKP DAN KONTROL KUALITAS HASIL PEKERJAAN KONSULTAN Geo KKP……..... 89
A. Kualitas Data Pemutakhiran, Entri dan Validasi Buku Tanah Hasil Pekerjaan Konsultansi……89
1. Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan Pemutakhiran, Entri dan Validasi Buku Tanah…….. 89
2. Kualitas Data Awal pada Pekerjaan Konsultan…….. 90
3. Kualitas Data Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan…….94
B. Kontrol Kualitas Data Pemutakhiran, Entri dan Validasi Buku Tanah Hasil Pekerjaan Konsultan……. 104
1. Pelaksana Kontrol Kualitas Pekerjaan Pemutakhiran, Entri dan Validasi Buku Tanah……..104
2. Pelaksanaan Kontrol Kualitas Pekerjaan Pemutakhiran, Entri dan Validasi Buku Tanah yang Dilakukan oleh PT.Inasa Sakha Kirana……105

BAB VII PENUTUP…….……...126
A. Kesimpulan……126
B. Saran……..127

DAFTAR PUSTAKA..... 128
LAMPIRAN……131

ABSTRACT

The diversity of land registration data result in Indonesia needs to be uniformity standard and improvement of data quality. This uniformity and quality improvement is done by building the land database digitally using the Geo KKP application. The process of increasing Geo KKP data requires entry data and data validation. These activities required adequate human resources. The condition and number of human resources in Semarang city Land Office who responsible for this activity hasn't been able to solve the Geo KKP validation needs. Therefore, a strategy is required by carrying out the procurement of consultant services by utilizing the budget owned by Semarang city Land Office.

This research has a purpose to examine the procurement process of Geo KKP consultant services and review the result of data quality that have been done by the consultant. This type of research uses descriptive qualitative research that will explain the process of procurement and the results obtained from these activities. Data collection techniques in this reasearch were conducted by interviewing informants and studying the related documents. The data obtained were analyzed by qualitative data analysis so that it can be know the conclusion.

The procces of data analysis from this research obtained result that the procurement process is done electronically by starting the selection until the signing of the contract. Parties who become consultans in this activity is PT. Adiccon Mulya Semarang for data updating and PT. Inasa Sakha Kirana Bandung for data quality control. Activity by the consultant resulted in the improvement of the quality data Geo KKP.

Keywords: strategy, acceleration, Geo KKP, Procurement of consultant services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan masyarakat dibidang pertanahan. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut kepada publik, Kementerian ATR/BPN memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Akan tetapi, untuk mensukseskan sistem aplikasi tersebut dibutuhkan basis data tekstual dan basis data spasial secara digital, sehingga kantor pertanahan harus mendigitalkan data pendaftaran tanahnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, aplikasi KKP mulai dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menjadi aplikasi yang dapat menginventarisasi data spasial pertanahan secara digital yaitu dengan membuat aplikasi Geo KKP. Pada dasarnya Geo KKP hampir sama dengan KKP, hanya saja dalam Geo KKP lebih menekankan pada inventarisasi data spasial bidang tanah (pemetaan bidang tanahnya), karena Geo KKP adalah KKP yang berbasis keruangan. Tujuan dari Geo KKP adalah untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan standar sehingga memudahkan dalam pengelolaan informasi pertanahan (Pusdatin- BPN, 2014:5-6).

Data digital yang dibuat dari hasil kegiatan pendaftaran tanah baik data tekstual maupun spasial, ternyata belum menunjukan hasil yang positif atau belum sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terpetakannya bidang-bidang tanah serta tidak tersedianya Gambar Situasi (GS)/Surat Ukur (SU) baik spasial maupun tekstual serta Buku Tanah.

Berdasarkan kondisi-kondisi data hasil pendaftaran tanah di Indonesia, perlu dilakukan penyeragaman standar dan peningkatan kualitas data bidang tanah. Dengan demikian, permasalahan sengketa tanah sebagai dampak-dampak rendahnya kualitas tersebut dapat ditekan. Salah satu tahapan untuk tujuan tersebut adalah validasi data bidang tanah yang merupakan bagian yang harus dilakukan dalam KKP, disamping metode untuk penyeragaman standar dan peningkatan kualitas data bidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam Draft Petunjuk Pelaksanaan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar, Kedeputian Survei Pengukuran dan Pemetaan tahun 2014 (Pusdatin-BPN, 2014:6).

Dalam Sistem KKP diperlukan validasi data yang harus diterapkan. Kegiatan validasi data bidang pertanahan tersebut dilakukan pada buku tanah, surat ukur tekstual dan spasial serta peta pendaftaran. Bagi peta bidang yang belum masuk ke dalam sistem KKP harus disesuaikan dengan peta dasar terlebih dahulu sehingga dari validasi data tersebut dapat dipastikan bahwa data yang di masukkan sudah benar serta berguna. Validasi data tersebut juga merupakan bagian dari jaminan kualitas (*quality assurance).*

Dalam kegiatan BPN RI, data spasial harus mempunyai korelasi atau *link-up* dengan data tekstual yang menjembatani pembangunan *database* elektronik bidang tanah melalui sistem Geo KKP. Untuk meningkatkan kualitas *database* dimaksud, harus selalu melakukan *updating* data untuk mendapatkan data pertanahan yang akurat dan terkini sehingga upaya peningkatan kualitas data spasial harus dilakukan terus menerus, yang memerlukan energi, tenaga dan waktu dari seluruh potensi yang ada di lingkungan BPN RI. Motto yg di usung *"No Map No Certificate"* dan *"No Map No Plan"*. Sampai saat ini banyak sekali kendala terhadap energi, tenaga dan waktu untuk melakukan *updating* data serta melakukan peningkatan kualitas datanya (Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional, 26 November 2012). Seperti halnya terjadi salah satunya di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Kantor Pertanahan Kota Semarang merupakan salah satu kantor yang mengalami kendala energi, tenaga dan waktu untuk melakukan upaya peningkatan kualitas data spasial. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kota Semarang menjadi kendala utama. Berdasarkan data kepegawaian Kantor Pertanahan Kota Semarang, jumlah pegawai di Seksi Pengukuran dan Pemetaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan beban kerja sebagaimana diagram di bawah ini.

Gambar 1. Diagram rata-rata permohonan per bulan tahun 2014 dan 2015
Sumber : Data Kantor Pertanahan Kota Semarang, 2016

Oleh karena itu, jumlah pegawai yang ada tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan rutin jika harus melakukan *updating* data serta peningkatanan kualitas data spasial secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga perlu adanya strategi yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan tersebut demi percepatan Geo KKP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Nomor 20 tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan pertanahan secara menyeluruh di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan serta pengelolaan pertanahan menghimpun, mengelola dan menghasilkan data pertanahan yang sangat bernilai dan dibutuhkan oleh pemerintah, dunia usaha swasta maupun masyarakat luas. Mengingat pentingnya data pertanahan dimaksud (yang merupakan aset negara), maka dilakukan

pembangunan basis data yang handal. Salah satu yang dilakukan dalam rangka pembangunan basis data yang handal adalah dengan melakukan validasi data bidang pertanahan. Kegiatan validasi data bidang pertanahan meliputi validasi buku tanah, validasi surat ukur tekstual dan spasial, serta validasi peta pendaftaran. Pekerjaan ini akan dilaksanakan memanfaatkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dialokasikan pada satuan Kerja Kantor Pertanahan tahun 2015 (Pusdatin-BPN, 2014:6). Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat memanfaatkan PNBP dari anggaran APBN Kementerian ATR/BPN untuk mengadakan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Sebagai strategi Percepatan Geo KKP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul **"Strategi Percepatan Geo KKP Melalui Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan di Kantor Pertanahan Kota Semarang".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengadaan jasa konsultan Geo KKP di KantorPertanahan Kota Semarang?
2. Bagaimana kualitas data dan Kontrol Kualitas Geo KKP Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah dikerjakan oleh jasa konsultan tersebut?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menjelaskan proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultan Geo KKP sebagai strategi percepatan Geo KKP.
2. Penelitian ini juga menjelaskan hasil yang telah dikerjakan oleh jasa konsultan Geo KKP mengenai kualitas data Geo KKP.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaaan jasa konsultan Geo KKP.
b. Mengetahui kualitas data Geo KKP yang telah dikerjakan oleh jasa konsultan.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap proses pengadaan jasa konsultan.
b. Manfaat praktis yaitu menjadi bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan mengenai upaya mengatasi kendala kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam percepatan Geo KKP.

F. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini baik di perpustakaan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional maupun melalui media internet, sejauh yang diketahui penulis terdapat beberapa karya tulis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sigit Widodo	Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pelayanan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2007) (2008)	Mengetahui implementasi pelelangan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pelelangan umum di Kabupaten	Mekanisme pelaksanaan pelelangan umum. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yaitu:keterbatasan kemampuan dan jumlah panitia, penyusunan jadwal pelelangan umum yang kurang efektif, adanya persekongkolan untuk mensiasati proses pelelangan.
2	Nordina Marni	Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (2015)	Mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar pada program GeoKKP serta kendala yang dihadapi.	Mekanisme pelaksanaan peningkatan kualitas data spasial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Terdapat tahap yang belum dilaksanakan yaitu tahap validasi; Dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala antara lain:terdapat bidang tanah yang belum berkoordinat, adanya warkah yang tidak ditemukan, terjadi penomoran ganda, dan keterbatasan SDM.
3	Muhammad Rendi Oktaresi	Strategi Percepatan GeoKKP Melalui Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. (2017)	Proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultan Geokkp, kualitas datanya dan peningkatan prosentase (%) yang dihasilkan oleh jasa konsultan GeoKKP.	Pengadaan jasa konsultan Geo KKP Kantor Pertanahan Kota Semarang diawali dengan menentukan metode pengadaan yang digunakan kemudian dilanjutkan proses pengadaannya. Kualitas Geo KKP mengalami peningkatan antara sebelum adanya konsultan Geo KKP dengan setelah adanya konsultan Geo KKP. Hasil pekerjaan konsultan Geo KKP dalam rangka pemutakhiran data dilanjutkan dengan kontrol kualitas oleh

BAB VII

PENUTUP

F. Kesimpulan

1. Proses pengadaan jasa konsultan Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang bekerjasama dengan *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Diponegoro Semarang. Diawali dengan menentukan metode pengadaan jasa yang digunakan yaitu metode pemilihan secara e-seleksi umum badan hukum, jadwal pengadaan jasa konsultan berlangsung dari tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Juni 2016, membentuk panitia pengadaan jasa konsultan, menentukan persyaratan dan kriteria peserta, serta diakhiri dengan proses pengadaan jasa konsultan yaitu dari persiapan pengadaan sampai proses penetapan pemenang lelang sampai dengan penandatanganan kontrak sebelum pekerjaan Geo KKP dimulai. Kegiatan pengadaan jasa ini bersumber pada dana PNBP DIPA Kantor Pertanahan Kota Semarang sebesar Rp. 3.104.238.500,- untuk kegiatan pemutakhiran data Geo KKP dan sebesar Rp.299.667.500,- untuk kegiatan kontrol kualitas Geo KKP.
2. Data Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang mengalami peningkatan kualitas dari semula memiliki prosentase 48,05% yang terdiri dari 419.204 buku tanah terentri dan 219.315 bidang tanah terpetakan menjadi 55,97% yang terdiri dari 491.469 buku tanah terentri dan 275.086

bidang tanah terpetakan. Serta Kontrol kualitas pemutakhiran data Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Semarang tersebut dilakukan oleh PT. Inasa Sakha Kirana Bandung.

G. Saran

1. Kegiatan pemutakhiran data perlu terus dilakukan guna pemuktakhiran basis data pertanahan dan terintegrasi pada suatu sistem sehingga mudah untuk dikelola.
2. Pekerjaan pemutakhiran data dengan kontrol kualitas hendaknya dilakukan bersama-sama agar kontrol setiap pekerjaan menjadi lebih mudah dan tepat sehingga kesalahan yang terjadi bisa diatasi. Selain itu, kegiatan kontrol kualitas data hasil pemutakhiran sebaiknya dilakukan langsung oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang karena yang bertanggungjawab dalam pembangunan basis data pertanahan ini merupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2015). *Collins Cobuild-Dictionary of English*. PT Gramedia Printing, Jakarta

Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Basrowl dan Sukidin. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Insan Cendekia, Surabaya

Direktorat Penetapan Batas Kedeputian Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN. (2014). Petunjuk Pelaksanaan Kualitas Data Spasial BIdang Tanah Terdaftar. Pusdatin – BPN, Jakarta

Fiktor Junaidi Koropit, Herman Karamoy dan Hendrik Manossoh. (tanpa tahun). "Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010." *Jurnal.* Unsrat, Sulawesi Utara

George, Ritzer. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hady Arman, M. (2009). Perkembangan Sistem Komputerisasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*, STPN, Yogyakarta

Haryanto, Sindung. (2014). *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar Ruzz Media, Yogyakarta

Kadir, Abdul. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi.* ANDI, Yogyakarta

Marni, Nordina. (2015). Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar pada Program Geo KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan (Action Reasearch). *Skripsi*, STPN, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif.* PT. Remaja Rosda Karya, Bandung

Patriot Ginanjar S, Bambang Sudarsono dan Bandi Sasmito. (2014*).* "Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geo KKP untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Geodesi Undip Volum 3 No 2.* Universitas Diponegoro, Semarang

Pusdatin BPN RI. (tanpa tahun). Pembangunan Basis Data Spasial untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional. (tidak dipublikasikan), Jakarta

Royani, Rischy Venthy. (2013). Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP di Kantor Petanahan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, STPN, Yogyakarta

Slamet Muryono, Bambang Suyudi, Deden Dani Saleh dan Wahyuni. (2012). "Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang". *Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 7Tahun 4*. Yogyakarta, PPPM-STPN

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung

Wirawan, Ida Bagus. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Website :

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Acara Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta, 26 Agustus 2013 (Diakes pada www.bpn.go.id/Publikasi-Original/Pidato- Kepala-BPN-RI/sambutan-kepala-badan-pertanahan-nasional-republik- indonesia-3529 pada tanggal 05 Februari 2017 pukul 14.24 WIB)